

**KAJIAN DAYA DUKUNG LAHAN PADA CALON LOKASI
IBU KOTA PEMEKARAN KABUPATEN BOGOR BARAT DI
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

TUGAS AKHIR

*Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Pasundan*



Oleh.

HEMA RESTU TASYIBAN

NRP : 183060030

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

**PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA TULIS
DAN TIDAK MELAKUKAN FLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hema Restu Tasyiban
NRP : 183060030
Judul Tugas Akhir : Kajian Daya Dukung Lahan Pada Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiarisme, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari karya tulis ini terbukti bukan hasil sendiri dan saya dinyatakan melakukan tindakan plagiarisme sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Saya bersedia mempertanggungjawabkan tindakan saya dan menerima sanksinya

Bandung, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,



(Hema Restu Tasyiban)

**KAJIAN DAYA DUKUNG LAHAN PADA CALON LOKASI
IBU KOTA PEMEKARAN KABUPATEN BOGOR BARAT DI
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

Oleh.

Hema Restu Tasyiban

183060030

Menyetujui,

1. Ketua Sidang : Ir Jajan Rohjan, MT ()
2. Pembimbing 1 : Dr. Ir. Firmansyah, MT. ()
3. Pembimbing 2 : Ir. Jajan Rohjan, MT. ()
4. Penguji 1 : Supratignyo Aji ()

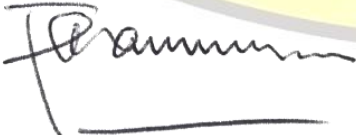
Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir

Ketua Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Pasundan



(Dr. Ir. Firmansyah, MT.)



(Deden Syarifudin, ST., MT.)

**KAJIAN DAYA DUKUNG LAHAN PADA CALON LOKASI
IBU KOTA PEMEKARAN KABUPATEN BOGOR BARAT DI
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**



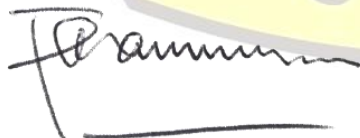
Nama : Hema Restu Tasyiban

NRP : 183060030

Mengetahui dan Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Dr. Ir. Firmansyah, MT)



(Ir. Jajan Rohjan, MT.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA TULIS TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hema Restu Tasyiban
NRP : 183060030
Judul Tugas Akhir : Kajian Daya Dukung Lahan Pada Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Demi kepentingan akademik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menyetujui untuk memberikan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir/Proyek Akhir ini kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan ***Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)*** beserta perangkatnya.

Dengan demikian Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta (HaKi).

Bandung, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,



(Hema Restu Tasyiban)

ABSTRAK

KAJIAN DAYA DUKUNG LAHAN PADA CALON LOKASI IBU KOTA PEMEKARAN KABUPATEN BOGOR BARAT DI KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

Oleh :

Hema Restu Tasyiban

NRP : 183060030

Kecamatan Cigudeg merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor dengan luas wilayah sekitar 17.761 hektar. Kecamatan Cigudeg berjarak sekitar \pm 54 km dari Pusat Kota Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong). Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 4/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 menyatakan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Kabupaten Bogor Barat. Dengan Calon Pusat Pemerintahan yaitu Kecamatan Cigudeg (Pramukanto, 2016, Walhadi, 2021). Untuk memenuhi tuntutan dalam penyediaan lahan calon lokasi ibu kota yang di khawatirkan ketersediaan lahan tidak dapat menampung kebutuhan lahan karena tidak semua kondisi fisik lahan dapat mendukung kontruksi pembangunan atau kestabilan pondasi. Maka, Penelitian ini mengarahkan untuk melihat daya dukung lahan untuk Calon Lokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif yang terdiri dari analisis kebutuhan lahan dengan mengacu kepada Permen PU No. 22/2018 dan SNI 03-1733-2004, analisis daya dukung lahan (Teknik overlay dan skoring) dan analisis lahan potensial. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketersediaan lahan seluas 13.325,03 hektar dapat memenuhi kebutuhan lahan seluas 407,53 hektar untuk kegiatan pusat pemerintahan dan 478,06 hektar untuk kegiatan masyarakat Kecamatan Cigudeg. Menyatakan bahwa Desa Cigudeg merupakan lokasi potensial untuk Kegiatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor Barat.

Kata kunci : Calon Lokasi Ibu Kota, Pemekaran Kabupaten Bogor Barat, daya dukung lahan, lahan potensial, ketersediaan lahan, Kecamatan Cigudeg

ABSTRACT

Study Of Land Carrying Capacity As A Candidate Location of Capital City West Bogor Regency in Cigudeg Subdistrict Bogor Regency

Author :

Hema Restu Tasyiban

NRP : 183060030

Cigudeg Subdistrict is one of the districts in Bogor Regency with an area of 17,761 hectares. Cigudeg subdistrict is about \pm 54 km from the City Center of Bogor Regency (Cibinong subdistrict). Based on the Regional Regulation of Bogor Regency No. 4/2019 concerning the Regional Medium-Term Development Plan for 2018-2023 states that it is related to the formation of a New Autonomous Region, namely West Bogor Regency. With Candidate for the Central Government, namely Cigudeg Subdistrict (Pramukanto, 2016, Walhadi). To meet the demands in the provision of land for the prospective location of the capital city, it is feared that the availability of land cannot accommodate land needs because not all physical conditions of the land can support construction/foundation stability. So, this study aims to see the availability of the candidate for the capital city of West Bogor Regency in Cigudeg subdistrict, Bogor Regency. The method used in this research is descriptive quantitative method consisting of analysis of land requirements by referring to the Minister of Public Works No. 22/2018 and SNI 03-1733-2004, analysis of land carrying capacity (overlay and scoring) and analysis of potential land. The results of the study, it was found that the availability of 13.325,03 hectares of land can meet the needs of 407.53 hectares of land for central government activities and 478.06 hectares for community activities in Cigudeg District. Stating that Cigudeg Village is a potential location for the West Bogor Regency Government Center Activities.

Keywords : Capital City Location Prospective, Expansion Of West Bogor Regency, Land Carrying Capacity, Potencial Land, Land Availability, Cigudeg Village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA TULIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN I.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Sasaran.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi.....	8
1.5 Metodologi Penelitian.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Matriks Variabel Penelitian.....	11
1.5.3 Identifikasi Kebutuhan Lahan Untuk Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.....	13
1.5.4 Identifikasi Daya Dukung Lahan pada Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.....	18

1.5.5	Identifikasi Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat	22
1.5.6	Matriks Analisis.....	26
1.5.7	Kerangka Analisis	29
1.6	Kerangka Berfikir	30
1.7	Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		32
2.1	Tinjauan Teori	32
2.1.1	Ibu Kota.....	32
2.1.2	Kebutuhan Lahan.....	41
2.1.3	Daya Dukung Lahan.....	45
2.1.4	Lahan Potensial	71
2.1.5	Ketersediaan Lahan	78
2.1.6	Sistem Informasi Geografis.....	83
2.2	Tinjaun Kebijakan	88
2.2.1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	88
2.2.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	92
2.2.3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	94
2.2.4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota	94
2.2.5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.....	96

2.2.6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.....	99
2.2.7	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum	100
2.2.8	Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Perekayasa Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum.....	101
2.2.9	Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	106
2.3	Tinjauan Studi Terdahulu	118
2.3.1	Irhamulloh, Naufal Fawaz. 2021. <i>Ketersediaan Lahan untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus : Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)</i> . Institute Teknologi Nasional: Bandung	118
2.3.2	Faneska, Aurelia. 2021. <i>Kajian Lahan Potensial Calon Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus : Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat)</i>	120
2.3.3	Ridha, Rasyid. Vipriyanti, Nyoman Utari. Wiswasta, IGN Alit. 2016. Analisis Daya Dukung Lahan Sebagai Pengembangan Fasilitas Perkotaan Kecamatan Mpunda Kota Bima Tahun 2015-2035. <i>Jurnal Wilayah dan Lingkungan</i> Vol. 4 (1) hal : 65-80.....	121
2.3.4	Yogaswara, Laila Mardlotillah. Darmawan. Iswati, Asdar. 2014. Analisis keselarasan antara penggunaan lahan saat ini dengan alokasi ruang dan status lahan (Studi kasus Kabupaten Bogor Bagian Barat). <i>Jurnal Tanah Lingkungan</i> Vol. 16(2) Hal:75-82	124
2.3.5	Budiarto, Asri. Dwiputri, Marselly. Hambali, Rizki. 2018. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Perumahan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Depok (Studi Kasus: Kecamatan Pancoran Mas	

	dan Kecamatan Sukmajaya). Jurnal Arsitektur Vol. 01 (01) hal:21-26.....	126
2.3.6	Pramukanto, Hasanah. 2016. Perencanaan Lanskap Cigudeg Sebagai Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat. Jurnal Lanskap Indonesia Vol. 8 (2):91-104.....	129
2.3.7	Arcana, I Kadek Fajar. DKK. 2021. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Kota Denpasar. Jurnal Ecotrophic. Vol 15(2):247-257.....	131
2.3.8	Fansuri, Fahri. (2017). Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Perumahan (Studi Kasus Kecamatan Cimahi). Bandung: Universitas Pasundan.....	133
2.3.9	Fauzi, Moh Agus. 2011. Perancangan Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar.....	135
2.3.10	Nonto, Erlangga. Sela, Rieneke LE. Tinangon, Alvin. 2021. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Kawasan Permukiman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Vol. 18 No. 2.....	137
2.3.11	Anindita, Friska Apriani. 2022. Analisis Ketersediaan Lahan Potensial Untuk Perumahan di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Universitas Pasundan Bandung.....	140
2.3.12	Matriks Studi Terdahulu.....	141
2.4	Penentuan Variabel Penelitian.....	156
2.4.1	Kebutuhan Lahan.....	156
2.4.2	Daya Dukung Lahan.....	160
2.4.3	Lahan Potensial.....	161
BAB III GAMBARAN UMUM.....		165
3.1	Interpretasi Kronologis Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor Barat.....	165
3.1.1	Alasan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat.....	167
3.1.2	Pusat Kegiatan.....	168
3.1.3	Kondisi Geografis.....	171
3.1.4	Kesimpulan.....	181

3.2	Arahan Kebijakan	182
3.2.1	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.....	182
3.2.2	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.....	188
3.3	Kondisi Kependudukan	201
3.3.1	Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021	201
3.3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis	202
3.4	Kondisi Fisik.....	204
3.4.1	Kemiringan Lereng.....	204
3.4.2	Jenis Batuan atau Geologi	207
3.4.3	Jenis Tanah	211
3.4.4	Air Tanah atau Hidrogeologi.....	214
3.4.5	Rawan Bencana Gerakan Tanah.....	217
3.4.6	Rawan Bencana Gempa Bumi.....	220
3.5	Kondisi Penggunaan Lahan	225
3.5.1	Distribusi Penggunaan Lahan Tahun 2019.....	225
3.5.2	Distribusi Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis.....	230
3.6	Status Lahan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.....	237
3.7	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor	240
BAB IV ANALISIS		245
4.1	Analisis Kebutuhan Lahan Untuk Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.....	245
4.1.1	Proyeksi Penduduk	246
4.1.2	Kebutuhan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan	249
4.1.3	Kebutuhan Lahan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg... ..	252
4.1.4	Kesimpulan Kebutuhan Lahan	255
4.2	Analisis Daya Dukung Lahan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor	257
4.2.1	Kriteria Analisis.....	257
4.2.2	Analisis Daya Dukung Lahan.....	261

4.3	Analisis Lahan Potensial Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.....	266
4.3.1	Identifikasi Penggunaan Lahan	266
4.3.3	Identifikasi Status Penguasaan Lahan	273
4.3.4	Kesimpulan Analisis Lahan Potensial	283
4.4	Analisis Ketersediaan Lahan	286
4.4.1	Ketersediaan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan	286
4.4.2	Ketersediaan Lahan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg.....	289
BAB V KESIMPULAN.....		290
5.1	Kesimpulan.....	290
5.2	Rekomendasi.....	291
5.3	Keterbatasan Studi	293
DAFTAR PUSTAKA		294
BUKU		294
JURNAL.....		295
REGULASI.....		299
WEBSITE		300
INSTANSI/DINAS		301
LAMPIRAN.....		xxvi
A.	Desain Survei.....	xxvi
2.1	Metode Pengumpulan Data	xxvi
2.2	Mekanisme Pengumpulan Data.....	xxx
2.3	Jadwal Pelaksanaan Survei.....	xxx
B.	Analisis	xxxii
B.1	Analisis Proyeksi Penduduk.....	xxxii
B.2	Analisis Kebutuhan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan	xxxvi
B.3	Analisis Penggunaan Lahan Eksisting.....	xlvi
C.	Bimbingan.....	lii
C.1	Formulir Pembimbing Utama.....	lii
C.2	Formulir Co-Pembimbing	lx
C.3	Formulir Bimbingan Dosen Pembahasan.....	lxvii
C.4	Formulir Bimbingan Dosen Penguji.....	lxxi

D.	Administrasi.....	lxxii
D.1	Kesbangpol Provinsi.....	lxxii
D.2	Kesbangpol Kabupaten Bogor.....	lxxiii
D.3	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Provinsi Jawa Barat	lxxv
D.4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bogor.....	lxxvii
D.5	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.....	lxxviii
D.6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.....	lxxix
D.7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor	lxxx
D.8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor	lxxxii
D.9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Petanahan Kabupaten Bogor	lxxxiii
D.10	Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	lxxxiii
D.1.1	Penerimaan Judul Tugas Akhir	lxxxiv
D.1.2	Pendaftaran SIKAPETA.....	lxxxiv
D.1.3	SK Pembimbing.....	lxxxv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unsur-unsur terbentuknya suatu Negara atau Daerah Kekuasaan adalah terdiri dari adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat (Mahfud, 2015). Sehingga, salah satu berdirinya daerah kekuasaan atau daerah otonomi baru yaitu dengan memiliki suatu wilayah sebagai tempat dalam melaksanakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek *administrative* dan aspek fungsional. Sehingga dalam menentukan suatu wilayah dan mengembangkan suatu wilayah perlu melakukan suatu perencanaan penataan ruang agar tapak atau wilayah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi ataupun daerah Kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah (Saparini, 2017). Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan pada hakikatnya pemekaran daerah lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah sebesar $\pm 2.986 \text{ km}^2$. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 alasan pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat yang terdiri dari 14 Kecamatan yaitu luas wilayah yang terlalu luas (posisi ke 4 di Provinsi Jawa Barat), kepadatan penduduk yang sangat tinggi (posisi pertama di Provinsi Jawa Barat sekitar 2.002 jiwa/Km^2), kemampuan keuangan daerah, adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Bogor Barat.

Menurut Rohmadin (2017) dalam analisis penataan daerah di Provinsi Jawa Barat dilihat dari aspek luas wilayah, aspek kependudukan, dan aspek cangkupan wilayah Kabupaten Bogor layak untuk dilakukannya pembentukan Daerah Otonomi Baru, karena sulitnya penjangkauan pelayanan pemerintahan di seluruh Wilayah Kabupaten Bogor, Sehingga disarankan untuk melakukan pemekaran wilayah untuk Kabupaten Bogor. Dan Kembali kepada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2018 menyatakan bahwa Wilayah Bogor Barat terkait arahan pemusatan kegiatan Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat terpilih yaitu Kecamatan Cigudeg.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor menempatkan Kecamatan Cigudeg sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala daerah atau beberapa kecamatan, serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah. Indikasi Program PKLp yaitu pengembangan rencana pusat kota di Kecamatan Cigudeg. Kemudian peraturan zonasi di kecamatan cigudeg menetapkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan meliputi kegiatan pemerintahan Kabupaten atau kecamatan, perdagangan jasa, Pendidikan, Kesehatan, wisata, industry, sosial budaya, kesenian dan olahraga. Program perwujudan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan kegiatan pengembangan kawasan pusat kota PKLp Kecamatan Cigudeg. Melihat kondisi tersebut bahwa Kecamatan Cigudeg berpotensi sebagai lokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat, sehingga dalam penelitian ini Kecamatan Cigudeg sebagai lokasi penelitian untuk Lokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat.

Adapun ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota bahwa Calon Lokasi Ibu Kota salah satunya harus melihat kondisi geografis dan kondisi ketersediaan lahan. Faneska (2021) bahwa kondisi fisik lahan di setiap daerah

bervariasi, untuk melihat kondisi fisik yang baik sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan dibutuhkan adanya tingkat kemampuan lahan untuk menyatakan suatu potensi lahan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya serta dampak dari kemampuan lahan ini juga dapat berpengaruh terhadap konstruksi pembangunan kawasan pemerintahan tersebut.

Sehingga untuk menjadikan Kecamatan Cigudeg sebagai lokasi ibu kota harus melihat kondisi fisik lahan tersebut apakah dapat menampung konstruksi pembangunan kawasan pemerintahan tersebut. Pramukanto (2016) bahwa hanya seluas 28,1% lahan di kecamatan Cigudeg yang dapat dilakukan pembangunan, dengan adanya calon ibu kota membutuhkan lahan untuk pusat pemerintahan. Karena semakin meningkatkan penduduk maka kebutuhan lahan akan semakin meningkat dan ketersediaan lahan harus berbanding lurus dengan kebutuhan lahan. maka penelitian ini berjudul “Kajian Daya Dukung Lahan Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat berdasarkan aspirasi masyarakat hal ini perlu adanya perencanaan terkait kebutuhan ruang untuk pusat pemerintahan, ditambah lagi Kecamatan Cigudeg sebagai PKLp Kabupaten dengan fungsi kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala daerah atau beberapa kecamatan, serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah utama fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan meliputi kegiatan pemerintahan Kabupaten atau kecamatan (RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036). Karena hal tersebut dikhawatirkan terjadi pembangunan yang tidak terkendali yang menjadikan Kecamatan Cigudeg sebagai tujuan prioritas utama bagi penduduk untuk pindah dan membangun karena menjadi pusat pemerintahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 persyaratan calon lokasi ibu kota salah satunya kondisi geografis yaitu memiliki resiko bencana alam paling sedikit sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bogor Kecamatan Cigudeg memasuki kategori rawan bencana Gerakan

tanah tinggi. Analisis pengembangan fisik menghasilkan daerah yang sesuai untuk pengembangan (*developable*) fisik tinggi, menengah dan rendah. Total luas daerah pengembangan sebesar 28,1% yang dapat dikembangkan sebagai pusat administrasi, fasilitas umum dan pendukung daerah komersial (Pramukanto, 2016). Sehingga perlu diketahui terkait kondisi fisik lahan dengan kebutuhan lahan untuk lokasi pusat pemerintahan. Melihat dari permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana Kebutuhan Lahan untuk Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat ?
- Bagaimana Daya Dukung Lahan di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat ?
- Bagaimana Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui Ketersediaan Lahan pada Kecamatan Cigudeg Sebagai Calon Lokasi Ibu kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

1.3.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan membutuhkan cara yaitu sasaran. Berikut merupakan sasaran dalam penelitian ini, yaitu :

- Teridentifikasinya kebutuhan lahan untuk lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.
- Teridentifikasinya Daya Dukung Lahan di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.
- Teridentifikasinya Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan Batasan dalam suatu kajian, supaya kajian dapat berfokus menghasilkan tujuan dan sasaran. Ruang lingkup dalam penelitian ini

terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Berikut merupakan ruang lingkup dalam penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

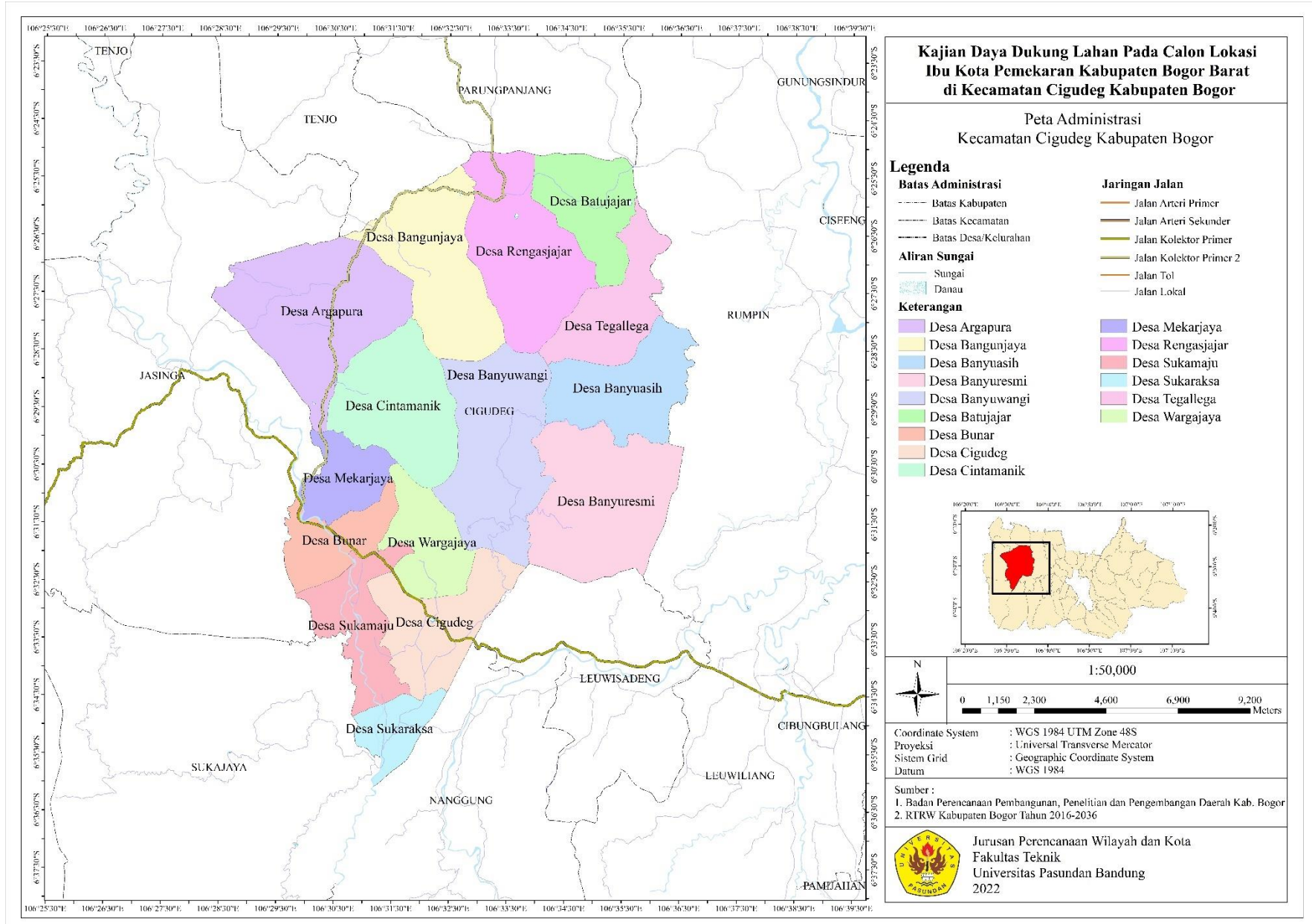
Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Memiliki 40 (empat puluh) Kecamatan salah satu kecamatan-nya yaitu Kecamatan Cigudeg. Kecamatan Cigudeg merupakan Daerah yang akan dijadikan pusat kota pada saat pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat. Luas wilayah Kecamatan Cigudeg yaitu 17.761 hektar dengan batas administrasi yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Tenjo
- Sebelah Selatan : Kec. Nanggung, Kec. Leuwisadeng, Kec. Cibungbulang
- Sebelah Barat : Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Sukajaya
- Sebelah Timur : Kecamatan Rumpin

Tabel 1. 1 Tabel Luas Ruang Lingkup Wilayah

No.	Kecamatan	Desa	Luas (hektar)	Persentase (%)
1	Cigudeg	Argapura	2.063,35	11,62
2		Bangunjaya	1.525,25	8,59
3		Banyuasih	1.140,30	6,42
4		Banyuresmi	1.903,75	10,72
5		Banyuwangi	1.817,77	10,23
6		Batujajar	911,05	5,13
7		Bunar	658,60	3,71
8		Cigudeg	1.100,64	6,20
9		Cintamanik	1.428,63	8,04
10		Mekarjaya	583,49	3,29
11		Rengasjajar	1.662,51	9,36
12		Sukamaju	852,87	4,80
13		Sukaraksa	433,07	2,44
14		Tegallega	930,60	5,24
15		Wargajaya	749,30	4,22
Total			17.761,18	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036



Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Kajian



1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini untuk berfokus pada tujuan dan memaksimalkan sasaran dan tidak melebar keluar dari topik pembahasan. Berikut merupakan ruang lingkup substansi dalam penelitian ini.

A. Teridentifikasinya Kebutuhan Lahan untuk Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam mendukung analisis kebutuhan lahan di Kecamatan Cigudeg sebagai calon lokasi ibu kota pemekaran Kabupaten Bogor Barat, yaitu :

1. Menganalisis kebutuhan lahan untuk Kegiatan Pusat Pemerintahan yang terdiri dari kebutuhan lahan untuk kawasan perkantoran, perumahan ASN, fasilitas penunjang kawasan pemerintahan dengan menggunakan jumlah personel Aparatur Sipil Negara. Analisis mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
2. Menganalisis kebutuhan lahan untuk Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg. (Sutriani, 2006) Karena Pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Sehingga analisis kebutuhan lahan Kegiatan Masyarakat Cigudeg terdiri dari permukiman non ASN, fasilitas perdagangan, fasilitas Kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas Pendidikan, fasilitas olahraga/rekreasi, dan fasilitas RTH (Ridha, 2016 dan Monoarfa, 2020). Sehingga menganalisis kebutuhan lahan tersebut dengan memproyeksikan penduduk dengan data awal yaitu jumlah penduduk Kecamatan Cigudeg tahun 2017-2021 di proyeksikan pada tahun 2026-2041 (20 tahun). Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

B. Teridentifikasinya Daya Dukung Lahan pada Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam mendukung analisis daya dukung lahan digunakan kriteria Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Bandung tahun 2010 tentang kriteria peruntukan perumahan perkotaan yang sudah berfokus terhadap konstruksi bangunan sebagai pondasi perumahan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghitung daya dukung lahan terhadap permukiman atau lahan yang berpotensi terbangun dengan variabel yang digunakan adalah kemiringan lereng, jenis tanah, jenis batuan, potensi Gerakan tanah, rawan bencana gempa bumi yang kemudian di berikan nilai dan bobot dan menghasilkan skor (nilai kali bobot) dan mendapatkan hasil daya dukung lahan dengan kriteria tidak leluasa, kurang leluasa, agak leluasa, cukup leluasa, dan leluasa untuk zona pengembangan.

C. Teridentifikasinya Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam analisis lahan potensial yang dapat dijadikan lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat menggunakan teknik analisis *overlay* data atau peta dengan identifikasi lahan potensial, yaitu :

1. Daya Dukung Lahan Leluasa, Cukup Leluasa dan Agak leluasa.
2. Penggunaan lahan eksisting tahun 2019 dengan penggunaan lahan non terbangun atau yang belum di manfaatkan.
3. Status lahan atau status kepemilikannya lahan untuk dilakukannya pembebasan lahan.

Sehingga akan menghasilkan luasan lahan potensial yang berada di Kecamatan Cigudeg untuk dapat dijadikan lahan yang berpotensi sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Donatus (2016) Pendekatan kuantitatif berarti jumlah atau banyaknya sesuatu hal. Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat “menjumlahkan atau mengumpulkan”. Pendekatan kuantitatif yang menggunakan alat ukur statistik, penetapan variabel-variabel, usaha untuk menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel itu. Penentuan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain tentu berpatokan pada ukuran dengan alat ukur nya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif karena penelitian berfokus kepada perhitungan secara data statistik. Karena perhitungan dalam penelitian ini terkait luas ketersediaan lahan dengan Teknik analisis *overlay* (beberapa peta fisik) dan *sumperimpose* (nilai di kalikan dengan bobot menjadi skoring) di bantu dengan aplikasi Microscop Excel 2016. Metode pendekatan dapat di lihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Penggunaan Metode Pendekatan Berdasarkan Sasaran Penelitian

No	Sasaran	Metode Pendekatan	Keterangan
1	Teridentifikasinya kebutuhan lahan untuk lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat	Deskriptif Kuantitatif	Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah luasan kebutuhan lahan dalam mendukung untuk Kawasan Pemerintahan.
2	Teridentifikasinya Daya Dukung Lahan pada Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat		Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui luasan jumlah daya dukung lahan.
3	Teridentifikasinya analisis Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat		Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjabarkan lahan potensial atau ketersediaan lahan untuk dibangun. Perbandingan luasan antara kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan untuk lokasi ibu kota pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

1.5.2 Matriks Variabel Penelitian

Matriks variabel penelitian merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta dengan indikator dan sumber yang digunakan sebagai acuan.

Tabel 1. 3 Matriks Variabel Penelitian

No.	Faktor Penelitian	Variabel Penelitian	Parameter	Sumber
1.	Kebutuhan Lahan	Proyeksi Penduduk	ASN Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Monoarfa (2020)
			Penduduk Kecamatan Cigudeg	<ul style="list-style-type: none"> Idrus (2014) Surtiani (2006) Ahyuni (2016)
		Kegiatan Pemerintahan	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> Monoarfa (2020) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan
			Sarana Penunjang	
			Perumahan	
		Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Ridha (2016)
			Pendidikan	
			Peribadatan	
			Kesehatan	
			Perdagangan dan Jasa	
Kondisi Fisik Wilayah	Daya Dukung Lahan	Kemiringan Lereng (0-25%)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Bandung, 2010 Gomudha, 2021 Memed, 2021 	
		Jenis Batuan Geologi (Keras dan Sedang)		
		Jenis Tanah (Batuan, Tanah Residu, Pasir dan Kerikil)		

No.	Faktor Penelitian	Variabel Penelitian	Parameter	Sumber
			Air Tanah (Tinggi dan Sedang)	
			Rawan Bencana Gerakan Tanah (Tidak Tinggi)	
			Rawan Bencana Gempa Bumi (Tidak tinggi)	
3.	Lahan Potensial	Daya Dukung Lahan	Zona Pengembangan Leluasa	<ul style="list-style-type: none"> • Andiani, Darmawan, Alwin, DKK. 2011
			Zona Pengembangan Cukup Leluasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan Bandung, 2010
			Zona Pengembangan Agak Leluasa	<ul style="list-style-type: none"> • Romenah, 2010
		Penggunaan Lahan	Non Terbangun (Hutan lahan kering, perkebunan, sawah, semak belukar, kebun campuran, ladang/tegalan, lahan terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya • Anindita, 2022 • Haidir, 2018 • Nonto, 2021
			Status lahan	Hak Milik
		Hak Guna Usaha		
		Hak Guna Bangunan		
Hak Pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Anindita, 2022 			
Hak Sewa	<ul style="list-style-type: none"> • Yogaswara, 2014 			
Hak Membuka Tanah				
Tanah Negara di Kuasai				

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

1.5.3 Identifikasi Kebutuhan Lahan Untuk Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam analisis kebutuhan lahan sebagai calon lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis. Berikut merupakan penjabaran-nya.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan lahan yaitu dengan pengumpulan data sekunder yaitu data yang berasal dari studi literatur, dokumen, peraturan terkait atau yang berlaku dan data-data yang dikeluarkan oleh instansi.

Tabel 1. 4 Tabel Kebutuhan Data untuk Analisis Kebutuhan Lahan

No	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Dinas	Alamat
1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor berdasarkan golongan I, II, III dan IV	- Dokumen - Excel - Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bogor	Jl. Bersih Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat 16914
2.	Jumlah penduduk Kecamatan Cigudeg tahun 2017-2021	dalam Unit Analisis Desa	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor	Pemda Cibinong Jalan Bersih, Kompleks Perkantoran, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam analisis kebutuhan lahan calon lokasi ibu kota pemekaran Kabupaten Bogor Barat dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu perhitungan jumlah penduduk beserta dengan kebutuhan lahan yang mengacu kepada standar minimum kebutuhan lahan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing analisis.

1. Proyeksi Penduduk

- Proyeksi penduduk pertama yaitu untuk kegiatan pusat pemerintahan di asumsikan bahwa 1 ASN akan membawa 4 anggota keluarga. Perhitungan jumlah penduduk ASN ini akan digunakan untuk perhitungan kebutuhan lahan sarana penunjang permukiman ASN. (Monoarfa, 2020)
- Proyeksi penduduk kedua yaitu untuk kegiatan masyarakat Kecamatan Cigudeg, analisis ini di asumsikan dengan proyeksi penduduk menggunakan metode analisis lungpolinomial karena $R^2 = 1$ sehingga proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Cigudeg 2026-2041 menggunakan rumus lungpolinomial. Analisis perhitungan jumlah penduduk Kecamatan Cigudeg ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan lahan untuk kegiatan masyarakat kecamatan Cigudeg.

Tabel 1. 5 Perbandingan Metode Proyeksi Penduduk

No	Metode Proyeksi	Nilai R^2	Keterangan
1	Eksponensial	0,6216	Pertambahan penduduk tidak meningkat setiap tahunnya sehingga R^2 yang didapatkan hanya 0,6216.
2	Regresi Linear Berganda	1	Pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat dari tahun 2026-2041. Namun pada tahun 2021 ke tahun 2026 mengalami penurunan jumlah penduduk.
3	Bunga Berganda (Geometrik)	0,9905	Pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami peningkatan namun R^2 yang dimiliki hanya sebesar 0,9905
4	Lung Polinomial	1	Pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2026 sampai tahun 2041 dan dengan R^1 adalah 1

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2022

2. Kebutuhan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan

Faneska (2021) dan Irhamulloh (2021) menjelaskan bahwa kebutuhan lahan untuk kegiatan pemerintan terdiri dari Gedung perkantoran, sarana penunjang, perumahan ASN dan fasilitas pendukung perumahan ASN. Analisis ini mengacu kepada yaitu :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan

$$\text{Kebutuhan Lahan Zona Inti} = \text{Jumlah ASN} \times \text{Kebutuhan Lahan Minimum m}^2/\text{Jiwa}$$

Gedung Negara

- Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

$$\text{Kebutuhan Lahan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (ASN + 4 Anggota keluarga)}}{\text{Standar Penduduk Pendukung}} \times \text{standar kebutuhan lahan m}^2$$

Tabel 1. 6 Tabel Kriteria Analisis Kebutuhan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan

Zona Kawasan	Fasilitas dalam Kawasan	Penjabaran	Kebutuhan Lahan (m ²)/jiwa	Sumber
Pusat Pemerintahan	Kawasan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari 32 Dinas	Ruang Anggota ASN	10,00	<ul style="list-style-type: none"> •Irhamulloh, 2021 •Faneska, 2021 •Permen PUPR RI No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
		Eselon IIA	74,40	
		Eselon IIB	62,40	
		Eselon IIIA	24,00	
		Eselon IIIB	21,00	
		Eselon IV	18,80	
	Sarana Penunjang Perkantoran	Ruang Rapat Utama	140,00/100	<ul style="list-style-type: none"> •Irhamulloh, 2021 •Faneska, 2021 •SNI 03-1733-2004 ttg Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
		Ruang Rapat Pimpinan Tingkat Eselon II	40,00/30	
		Ruang Studio	4,00 / 10%	
		Ruang Arsip	0,40	
		wc/Toilet	2,00	
		Mushola	0,80 / 20%	
		Lahan Pelayanan Kesehatan	0,01	
		Lahan Parkir Mobil	11,50	
		Lahan Parkir Motor	1,50	
		Lahan Kantin	0,4	
		Lahan Peribadatan (Masjid Agung)	0,12	
		Lahan Pos Pemadam Kebakaran	0,01	
		Lahan Pos Keamanan	0,06	

Zona Kawasan	Fasilitas dalam Kawasan	Penjabaran	Kebutuhan Lahan (m ²)/jiwa	Sumber
		Ruang Terbuka Hijau	0,30	
	Kawasan Perumahan ASN	Tipe Khusus (Menteri, Pimpinan Lembaga tinggi negara dan setingkat Menteri)	1.000,00	<ul style="list-style-type: none"> •Irhamulloh, 2021 •Faneska, 2021 •Permen PUPR RI No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara •SPM PU 534 (2001) tentang tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum •Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
		Tipe A (Sekjen, Dirjen, Irjen dan anggota Lembaga tinggi negara)	600,00	
		Rumah Tipe B (Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e)	350,00	
		Rumah Tipe C (Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c)	200,00	
		Rumah Tipe D (Pegawai Negeri Sipil Golongan III)	120,00	
		Rumah Tipe E (Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II)	100,00	
		Sarana Untuk Permukiman	15%	
		RTH untuk Permukiman	20%	
	Sirkulasi dan Infrastruktur	Jalan	5%	<ul style="list-style-type: none"> •Monoarfa, 2020 •SPM PU 534 (2001) tentang tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum
		Sirkulasi Air Bersih	6%	
		Kebutuhan Sirkulasi Lainnya	2%	

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

3. Kebutuhan Lahan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg

(Sutriani, 2006) Karena Pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Sehingga analisis kebutuhan lahan untuk kegiatan masyarakat Kecamatan Cigudeg sebagai berikut.

Tabel 1. 7 Tabel Kriteria Analisis Kebutuhan Lahan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg

Zona Kawasan	Fasilitas dalam Kawasan	Penjabaran	Jumlah Penduduk Pendukung	luas lahan minimum		standar (m ² /jiwa)	Sumber
				m ²	hektar		
Zona Perluasan Kawasan Ibu Kota	Kawasan Permukiman Non ASN	Rumah Kecil	1 KK terdiri dari 5 Anggota keluarga	80,00	0,012		<ul style="list-style-type: none"> •Ridha, DKK. 2016 •Anindita, 2022 •SNI 03-1733-2004 ttg Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
		Rumah Sedang		100,00	0,014		
		Rumah Besar		150,00	0,015		
	Fasilitas Pendidikan	TK	1.250	500,00	0,05	0,40	
		SD	1.600	3.000,00	0,30	1,88	
		SMP	4.800	9.000,00	0,90	1,88	
		SMA	4.800	15.000,00	1,50	3,13	
		Perguruan Tinggi	1.500.000	8.000,00	0,80	1,50	
	Fasilitas Kesehatan	Posyandu	1.250	60,00	0,01	0,05	
		Puskesmas Pembantu	30.000	300,00	0,03	0,00	
		Puskesmas	120.000	1.000,00	0,10	0,01	
		Apotik	30.000	250,00	0,03	0,03	
		Rumah Sakit Tipe A	1.500.000	172.800,00	17,28	25,00	
	Fasilitas Peribadatan	Mushola	250	45,00	0,00	0,36	
		Masjid Kecamatan	120.000	3.600,00	0,36	0,03	
	Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Pasar	30.000	10.000,00	1,00	0,33	
		Mall	120.000	36.000,00	3,60	0,30	

Zona Kawasan	Fasilitas dalam Kawasan	Penjabaran	Jumlah Penduduk Pendukung	luas lahan minimum		standar (m ² /jiwa)	Sumber
				m ²	hektar		
	Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi	Balai Serbaguna	2.500	300,00	0,03	0,12	<ul style="list-style-type: none"> •Monoarfa, 2020 •SPM PU 534 (2001) tentang tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan
		Gedung Serbaguna	120.000	3.000,00	0,30	0,03	
Fasilitas RTH	Taman RT	250	250,00	0,03	1,00		
	Taman dan Lapangan Olahraga	120.000	24.000,00	2,40	0,20		
Sirkulasi dan Infrastruktur	Jalan			5% dari total kebutuhan lahan			
	Sirkulasi Air Bersih			6% dari total kebutuhan lahan			
	Kebutuhan Sirkulasi Lainnya			2% dari total kebutuhan lahan			

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

1.5.4 Identifikasi Daya Dukung Lahan pada Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam analisis daya dukung lahan bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan di Kecamatan Cigudeg yang mendukung untuk pembangunan dengan memperhatikan kestabilan pondasi yaitu mengacu kepada kriteria Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan tahun 2010.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis daya dukung lahan yaitu dengan pengumpulan data sekunder yaitu data yang berasal dari studi literatur, dokumen, peraturan terkait atau yang berlaku dan

data-data yang dikeluarkan oleh instansi terkait peta dan shp atau data tabular.

Tabel 1. 8 Tabel Kebutuhan Data Untuk Analisis Daya Dukung Lahan

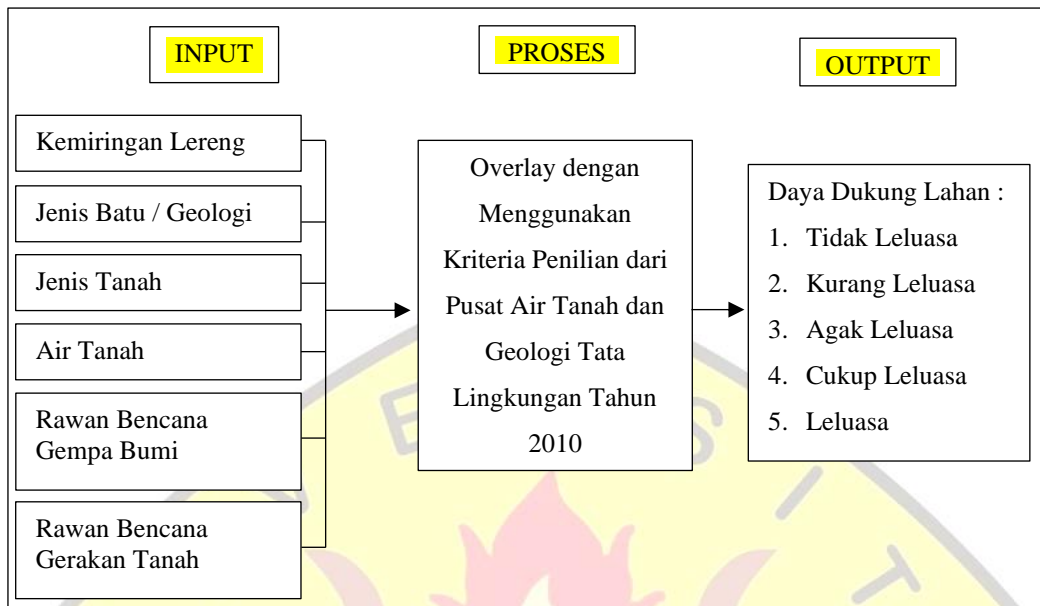
Kebutuhan Data	Skala Peta	Bentuk Data	Dinas	Alamat
- Peta Geologi atau Peta Jenis Batuan	1 : 50.000	- Dokumen	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Jl. Diponegoro No.57, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
- Peta Jenis Tanah		- Peta		
- Peta Hidrologi atau Peta Air Tanah		- SHP	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor	Jl. Segar III Komplek Perkantoran Pemda Bogor No.Kav. 2, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
- Peta Kemiringan Lereng atau Peta Topografi		- (RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036)		
- Peta Rawan Bencana Gempa Bumi		- Data dalam Unit Analisis Desa		
- Peta Rawan Gerakan Tanah				

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis daya dukung lahan metode *superimpose/skoring*. Menurut Budianto (2010) dalam Modul Analisis Spasial *Overlay Analisis* 2016, metode *superimpose/overlay* merupakan proses tumpang susun beberapa buah peta tematik dalam rangkaian kegiatan pengambilan kesimpulan secara spasial. *Superimpose/overlay* kan semua variabel-variabel spasial tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh variabel-variabel spasial dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai dari hasil spasial tersebut di wilayah dan/ atau kawasan perencanaan.

Berikut merupakan skema analisis daya dukung lahan :



Gambar 1. 2 Skema Untuk Analisis Daya Dukung Lahan

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

Dalam analisis daya dukung lahan untuk permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yaitu dengan menggunakan metode *overlay* mengacu pada kriteria berdasarkan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Bandung tahun 2010. Berikut merupakan variabel yang akan di teliti dalam analisis daya dukung lahan.

Tabel 1. 9 Variabel Daya Dukung Lahan

No.	Variabel Daya Dukung
1	Kemiringan Lereng
2	Jenis Tanah
3	Jenis Batuan Geologi
4	Air Tanah
5	Rawan Bencana Gempa Bumi
6	Potensi Gerakan Tanah

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010

Setelah melakukan penentuan variabel maka dilakukan pemberian nilai dan bobot yang kemudian menghasilkan skor dalam setiap variabel untuk dilakukan pengolahan secara *overlay*. Berikut merupakan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 10 Tabel Kriteria Daya Dukung Lahan

No.	Variabel	Klasifikasi	Keterangan	Nilai	Bobot	Skor (Nilai x Bobot)	
1	Kemiringan Lereng	0-8 %	Datar-Landai	4	4	16	
		8-15 %	Landai-Agak Terjal	3		12	
		15-40 %	Terjal	2		8	
		>40 %	Sangat Terjal	1		4	
2	Jenis Tanah	Batuan	Baik	4	5	20	
		Tanah Residu (>2m)	Sedang	3		15	
		Pasir dan Kerikil (≥5m)					
		Lanau, Pasir dan Kerikil (<5m)	Buruk	2		10	
		Lumpur, Lempung organik, dan Gambut	Sangat Buruk	1		5	
3	Jenis Batuan Geologi	Keras	Tinggi	4	5	20	
		Sedang	Sedang	3		15	
		Lunak	Rendah	2		10	
		Sangat Lunak	Sangat Rendah	1		5	
4	Air Tanah	Tinggi (>3 lt/dt)	Baik	4	3	12	
		Sedang (1-3 lt/dt)	Sedang	3		9	
		Rendah (0,4 – 1 lt/dt)	Buruk	2		6	
		Sangat Rendah (<0,5 lt/dt)	Sangat Buruk	1		3	
5	Rawan Bencana Gempa Bumi	Satuan : MMI			4	4	
		I, II, III, IV, V	Baik	4			16
		VI, VII	Sedang	3			12
		VIII	Buruk	2			8
		IX, X, XI, XII	Sangat Buruk	1			4
6	Potensi Gerakan Tanah	Sangat Rendah	Tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi bencana longsor (sangat stabil)	4	4	16	

No.	Variabel	Klasifikasi	Keterangan	Nilai	Bobot	Skor (Nilai x Bobot)
		Rendah	Tingkat kerentanan rendah untuk terjadi bencana longsor (cukup stabil)	3		12
		Menengah	Tingkat kerentanan sedang untuk terjadi longsor (kurang stabil)	2		8
		Tinggi	Tingkat kerentanan tinggi untuk terjadi bencana longsor (tidak stabil)	1		4

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010

Setiap variabel yang telah di overlay dengan pemberian nilai di kali dengan bobot dan menghasilkan skor kemudian di kelompokkan berdasarkan sesuai dengan kelas daya yang dukung lahan berdasarkan klasifikasi Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan Bandung Tahun 2010. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 11 Tabel Kriteria Daya Dukung Lahan

No.	Total Skor	Zona Pengembangan
1	24-38	Tidak Leluasa
2	39-52	Kurang Leluasa
3	52-67	Agak leluasa
4	68-81	Cukup leluasa
5	82-96	Leluasa

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010

1.5.5 Identifikasi Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

Dalam analisis lahan potensial bertujuan untuk mengetahui lahan potensial yang dapat dijadikan ketersediaan lahan di Kecamatan Cigudeg yang mendukung untuk pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lahan, penggunaan lahan, rencana tata ruang dan status lahan.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis lahan potensial yaitu dengan pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder

1. Pengumpulan Data Primer

- Observasi Lapangan dan Dokumentasi

Observasi lapangan dilakukan secara sederhana dengan mengamati kondisi penggunaan lahan eksisting dan dokumentasi penggunaan lahan eksisting. Sekaligus untuk mengetahui gambaran umum atau karakteristik secara langsung atau secara eksisting yang dapat menimbulkan gambaran lokasi calon ibu kota.

Tabel 1. 12 Tabel Observasi Lapangan dan Dokumentasi

No	Ceklis Foto	Sasaran	Keterangan
1.	Lokasi Calon Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat : <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Lahan Eksisting • Kondisi Jalan 	Teridentifikasinya analisis Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Barat sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (ketersediaan lahan)	

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

2. Pengumpulan Data Sekunder

Tabel 1. 13 Tabel Kebutuhan Data Untuk Analisis Lahan Potensial

Kebutuhan Data	Skala Peta	Bentuk Data	Dinas	Alamat
- Daya Dukung Lahan - Penggunaan Lahan Tahun 2022 - Dokumen kajian tentang calon lokasi ibu kota	1: 50.000	- Dokumen - Peta - SHP - (RTRW Kabupaten Bogor Tahun	BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor	Jl. Segar III Komplek Perkantoran Pemda Bogor No.Kav. 2, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Kebutuhan Data	Skala Peta	Bentuk Data	Dinas	Alamat
Kabupaten bogor barat		2016-2036) - Data dalam Unit Analisis Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor	Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
Status Lahan : - Hak Milik - Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara - Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan - Hak Pakai Di Atas Tanah Negara			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor	Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
			Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915

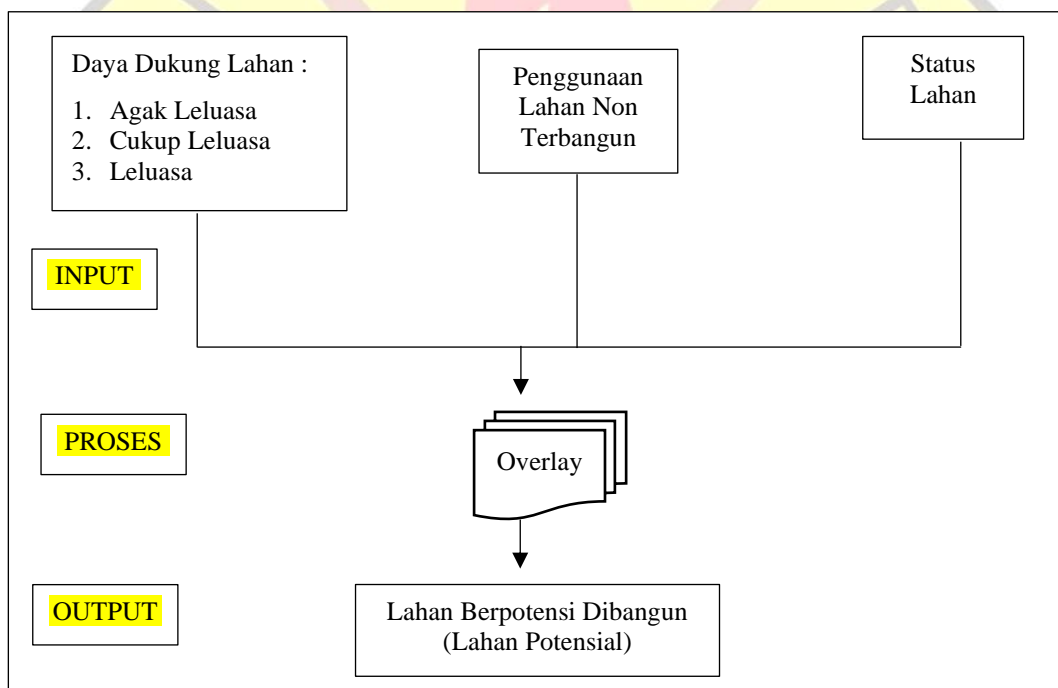
Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

B. Metode Analisis

Dalam analisis lahan potensial digunakan acuan dalam analisis ini yaitu dalam acuan Irhamulloh (2021) dan kurniati, (2020) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 41 Tahun 2007 tentang kawasan budidaya dan Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/11/80 tentang penetapan hutan lindung. Untuk lahan yang dapat di dimanfaatkan untuk pembangunan adalah Kawasan budidaya dengan fungsi utama untuk dibudidayakan baik untuk kondisi dan potensi daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan (Pasal 1 Ayat 5) sehingga **kawasan budidaya** boleh di bangun untuk pembangunan. Dengan klasifikasi **zona leluasa, cukup leluasa dan agak leluasa** karena zona leluasa adalah daerah yang memiliki sumber daya geologi yang tinggi dan faktor kendala geologi yang rendah sehingga sangat mudah untuk mengorganisasikan ruang dan tanpa perlu rekayasa pembangunan, sedangkan zona cukup leluasa adalah

daerah yang memiliki sumber daya geologi yang agak tinggi dan terdapat kendala geologi yang agak rendah, agak mudah dalam pengorganisasian ruang kegiatan maupun pemilihan jenis penggunaan lahan, namun perlu adanya rekayasa teknologi.

Menurut Faneska (2021) bahwa kriteria penentuan kelayakan lahan menurut badan geologi yaitu dengan menggabungkan beberapa informasi geologi lingkungan dan non geologi lingkungan. Geologi lingkungan yang dimaksud yaitu intensitas untuk tingkat kepentingan parameter selain itu sebagai optimalisasi penggunaan lahan serta ke aman dari bencana. Sedangkan Non-Geologi yaitu aspek perlindungan dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. 3 Skema Untuk Analisis Lahan Potensial

Sumber : Rumusan Peneliti, 2022

1.5.6 Matriks Analisis

Untuk mempermudah proses penelitian dibentuk suatu matriks analisis yang di jelaskan sesuai sasaran yang telah dirumuskan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 1. 14 Matriks Analisis

Sasaran	Output	Metode Analisis	Data Yang Digunakan		Sumber Data
			Data Primer	Data Sekunder	
Teridentifikasinya Kebutuhan Lahan Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat	Proyeksi Penduduk	<p>Deskriptif Kuantitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pusat Pemerintahan Di asumsikan 1 ASN akan memiliki 4 anggota keluarga (Monoarfa, 2020) Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cigudeg <p>Lung Polinomial :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $Pt + \theta = Pt(1+r)\theta$ </div> <p><i>Sumber : Teori Galouis 1832</i></p>	-	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ASN Kabupaten Bogor Jumlah penduduk Kecamatan Cigudeg Tahun 2017-2021 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bogor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

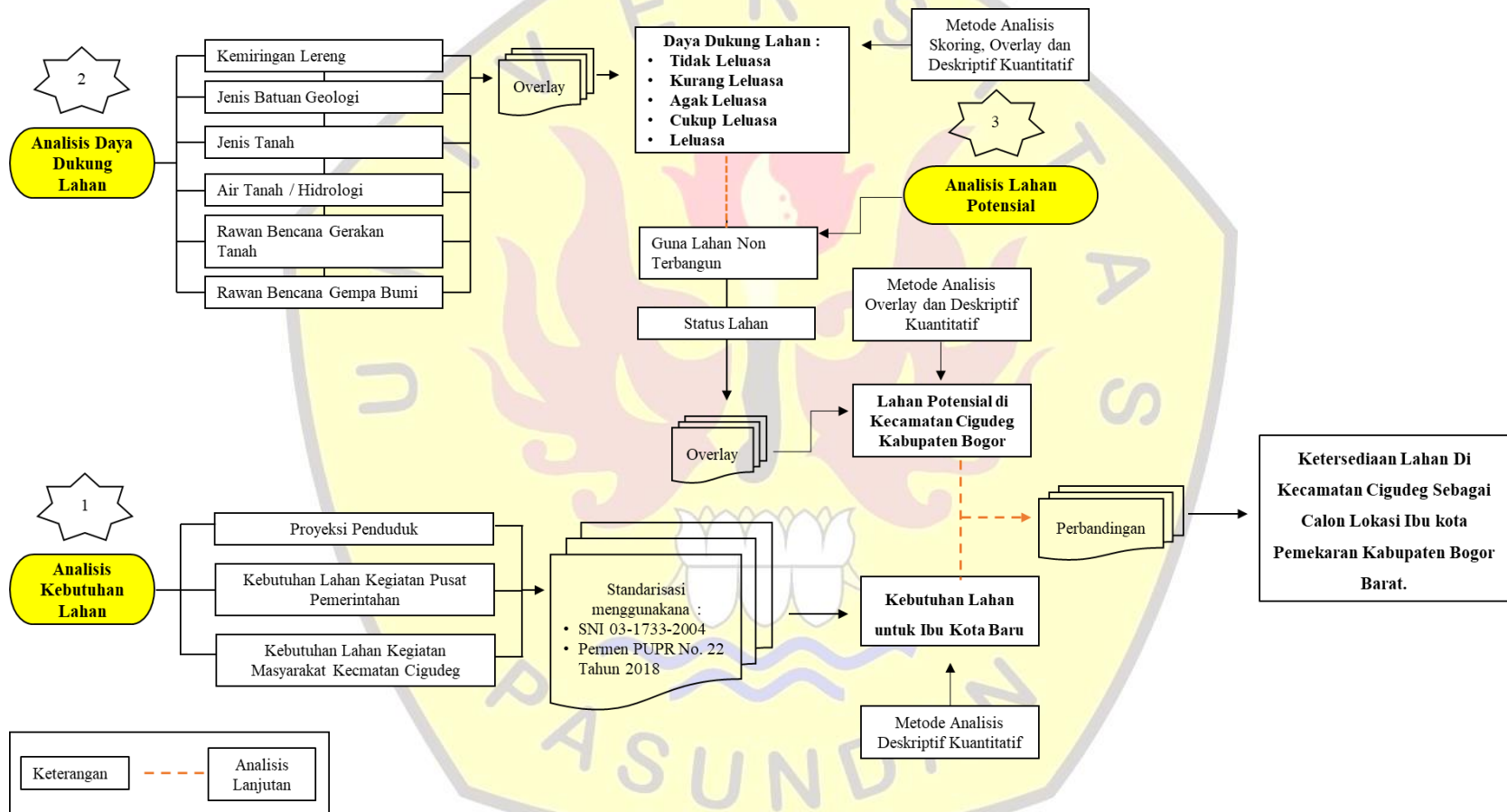
Sasaran	Output	Metode Analisis	Data Yang Digunakan		Sumber Data
			Data Primer	Data Sekunder	
	Kebutuhan Lahan Kegiatan Pusat Pemerintahan	<p>Deskriptif Kuantitatif</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Kebutuhan Lahan Zona Inti = Jumlah ASN x Kebutuhan Lahan Minimum m²/Jiwa </div> <p><i>Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara</i></p>	-	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ASN Kabupaten Bogor Tahun 2022 	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bogo
	Kebutuhan Lahan Kegiatan Masyarakat Cigudeg	<p>Deskriptif Kuantitatif</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Kebutuhan Lahan = $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Standar Penduduk Pendukung}} \times \text{standar kebutuhan lahan m}$ </div> <p><i>Sumber : Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan</i></p>	-	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Proyeksi Penduduk Kecamatan Cigudeg tahun 2026-2041 	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
Teridentifikasinya Daya Dukung Lahan Kecamatan Cigudeg Sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran	Daya Dukung Lahan Kecamatan Cigudeg : <ul style="list-style-type: none"> Leluasa Cukup Leluasa 	<p>Deskriptif Kuantitatif</p> Overlay peta kemudian pemberian skor. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Skor = Nilai x Bobot </div> <p><i>Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010</i></p>	-	<ul style="list-style-type: none"> Kemiringan Lereng, Jenis Batuan, Jenis Tanah Jenis Air Tanah, 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010 Bappedalitbangda Kabupaten Bogor PUPR Kabupaten Bogor

Sasaran	Output	Metode Analisis	Data Yang Digunakan		Sumber Data
			Data Primer	Data Sekunder	
Kabupaten Bogor Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Agak Leluasa • Kurang Leluasa • Tidak Leluasa 			<ul style="list-style-type: none"> • Rawan Bencana Gempa Bumi, • Rawan Bencana Gerakan Tanah 	
Teridentifikasinya Lahan Potensial di Kecamatan Cigudeg Sebagai Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat	Luas dan Lokasi lahan potensial non terbangun untuk lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat	<p style="text-align: center;">Deskriptif Kuantitatif</p> <p><i>Overlay</i> peta daya dukung lahan, penggunaan lahan eksisting dan status lahan</p>	Observasi Lapangan dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Daya Dukung lahan Cukup leluasa dan Agak Leluasa • Penggunaan Lahan Eksisting Non Terbangun • Status Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010 • Bappedalitbangda Kabupaten Bogor • PUPR Kabupaten Bogor • Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor • Badan Pertanahan Kabupaten Bogor • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber : Rumusan Peneliti, Tahun 2022

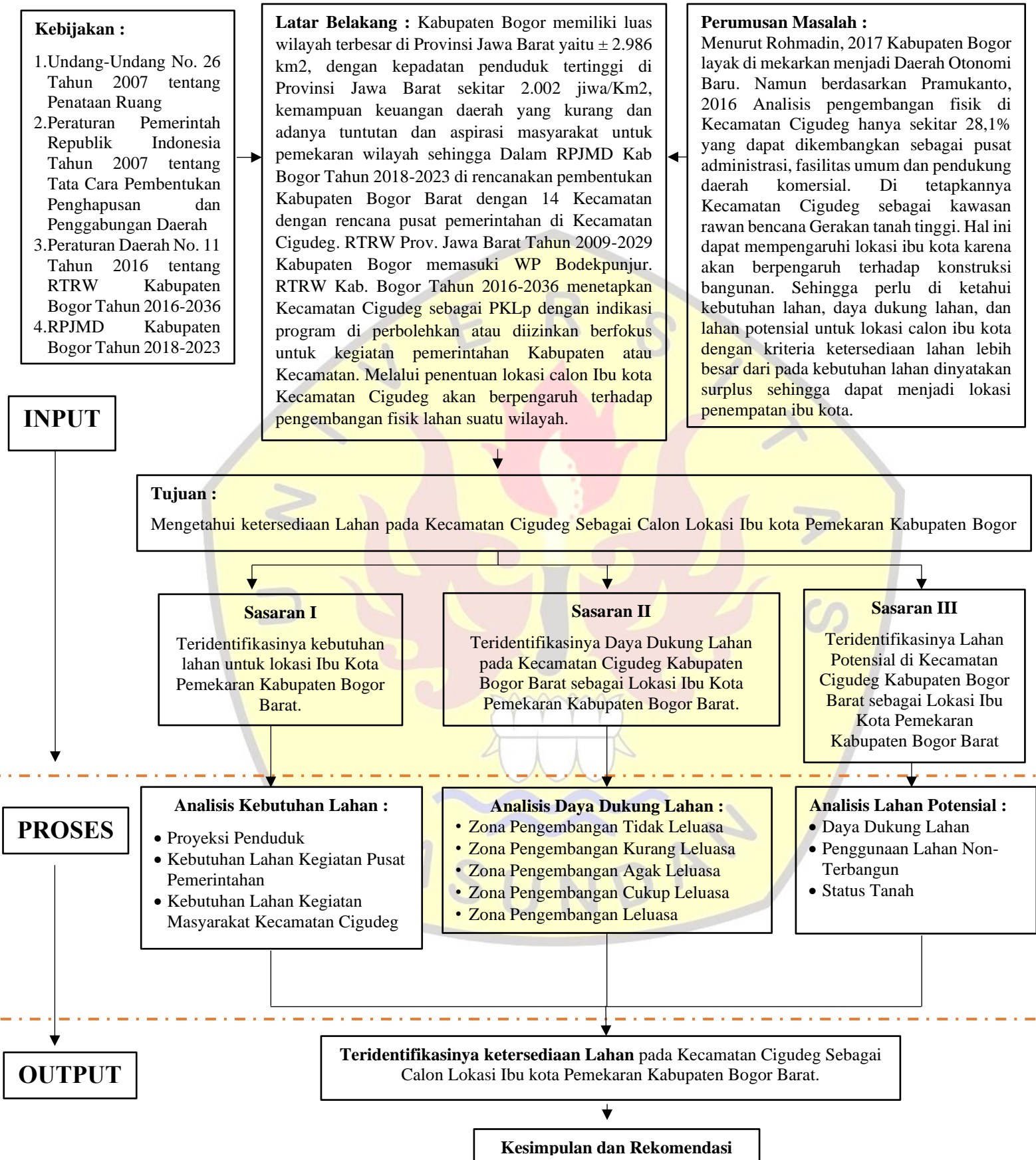
1.5.7 Kerangka Analisis

Dalam mempermudah pengerjaan analisis berikut merupakan skema kerangka analisis dalam Kajian Daya Dukung Lahan Pada Calon Lokasi Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.



Gambar 1. 4 Skema Analisis

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar 1. 5 Gambar Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dengan judul Kajian Daya Dukung Lahan Pada Calon Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan di lakukan kajian, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, metodologi berupa metode pengumpulan data dan analisis, sistematika pembahasan dan kerangka berfikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terkait tinjauan teori, tinjauan kebijakan, tinjauan literatur terdahulu yang akan menjadi dasar dalam kajian ini untuk mendukung sasaran dan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum yaitu terdiri dari kondisi fisik dasar, kondisi kependudukan di wilayah kajian dan Peraturan atau regulasi yang terkait daerah penelitian dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bogor.

BAB IV ANALISIS DAN TEMUAN

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan lahan, analisis daya dukung lahan, analisis lahan potensial dan analisis ketersediaan lahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran adalah output yang didapatkan dari hasil analisis dan hasil akhir dari semua pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bafdal, Nurpilihan. Amaru Kharistya. Pareira, Boy Macklin. 2011. *Sistem Informasi Geografis*. Jurusan Teknik Manajemen Industri Pertanian : FTIP UNPAD Jatinangor. Buku Ajar Edisi I.
- Bagja, S. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Andi
- BPBD Kabupaten Bogor. 2018. *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023*.
- Budianto, Eko. 2010. *Sistem informasi geografis dengan Arcview GIS*. Jogjakarta : Penerbit Andi.
- Chandra, budiman. 2007. *Pengantar kesehatan lingkungan*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC
- Fianti, Dian. 2014. *Morfologi dan Klasifikasi Tanah*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) : Universitas Andalas.
- Monoarfa, Suharso. 2020. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Bappenas.
- Muta'ali Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada
- Noor, Djauhari. 2006. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Prahasta, Eddy. 2009. *Sistem Informasi Geografis (Konsep-konsep dasar persektif geodesi dan geomatika)*. Informatika : Bandung.
- Pribadi, Anjar Abdi. 2018. *Kecamatan Cigudeg Dalam Angka Tahun 2018-2021* BPS Kabupaten Bogor.
- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : LO2ES, 2012
- Sofyan, Ali. 2017. *Kecamatan Cigudeg Dalam Angka Tahun 2017*. BPS Kabupaten Bogor.
- Subardja, D., S. Ritung, M. Anda, Sukarman, E. Suryani, dan R.E. Subandiono. 2014. *Petunjuk Teknis Klasifikasi Tanah Nasional*. Balai Besar Penelitian

dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 22 hal.

Yulhendra, Dedy. 2016. *Paket Keahlian Geologi Pertambangan*. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik 2016

JURNAL

Agnar, Auzan Amanatullah. DKK. 2020. *Evaluasi Lahan Permukiman Berdasarkan Analisis Geologi Lingkungan Daerah Tanjungjaya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Padjadjaran Geoscience Jour : Vol 4(5)

Anindita, Friska Apriani. 2022. *Analisis Ketersediaan Lahan Potensial Untuk Permukiman di Kecaamatan Sumber Kabupaten Cirebon*. UNPAS

Andiani, Darmawan, A, Badri, I, dan Kurniawan A. 2011, 'Peranan Geologi Tata Lingkungan Dalam Penataan Ruang Kota Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009', *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, Vol. 2, No.1, 95-11.

Arcana, I Kadek Fajar. DKK. 2021. *Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Kota Denpasar*. *Jurnal Ecotrophic*. Vol 15(2):247-257.

Budiarto, Asri. Dwiputri, Marselly. Hambali, Rizki. 2018. *Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Perumahan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Depon (Studi Kasus: Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya)*. *Jurnal Arsitektur* Vol. 01 (01) hal:21-26

Donatus, Sermada Kelen. 2016. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial : Titik Kesamaan dan Perbedaan*. Vol.16 No. 2.

Effendi, DKK. 1998. *Peta Geologi Lembar Bogor, Jawa Barat, Skala 1:100.000*. Direktorat Geologi, Bandung

Faneska, Aurelia. 2021. *Kajian Lahan Potensial Calon Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus: Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat)*. Dalam

Fansuri, F. (2017). *Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Perumahan (Studi Kasus Kecamatan Cimahi)*. Bandung: Universitas Pasundan.

Fauzi, Moh Agus. 2011. *Perancangan Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar*

- Gea, Selamat. Damanik Muhammad R.S. 2018. *Analisis Potensi Lahan Pertanian padai Sawah di Kabupaten Nias Utara memanfaatkan sistem informasi geografis*. Jurnal Tunas Geografi Vol 7 (01).
- Gomudha, I Wayan. 2001. *Kelurahan Sempidi Sebagai Alternatif Pilihan Ideal Lokasi Tapak Pusat Pemerintahan Kabupaten (PPK) Badung*.
- Haidir, H., & Rudiarto, I. (2019). *Lahan Potensial Permukiman Di Kota Semarang*. *Tataloka*, 21(4), 575-588.
- Heksano, Syihabuddin. 2014. *Kesesuaian Lahan Perumahan Berdasarkan Karakteristik Fisik Daerah Kota Batu*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya
- Idrus, Ilham. 2014. *Membangun Kota Mandiri*. <https://www.researchgate.net/publication/339446409_MEMBANGUN_KOTA_MANDIRI> diakses 12 Maret 2022.
- Irhamullah, Naufal Fawaz. 2021. *Ketersediaan Lahan Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus : Kecamatan Kertajati)*
- Kurniati, Nia. DKK. 2020. *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Arah Fungsi Kawasan*. *Jurnal kajian, penelitian dan pengembangan Pendidikan*. Vol. 8 No.2 (109-120).
- MD, Moh Mahfud. 2015. *Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*. Vol 4 No. 3.
- Memed, Mochamad Wahyudi. 2021. *Webinar Teknik Geofisika ITS*. Geologi Tata Lingkungan 2021
- Nasiah. Invanni, Ichsan. 2014. *Identifikasi Daerah Rawan Bencana Longsor Lahan sebagai Upaya penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai*. Vol.III (2). Hal 109-121.
- Nonto, Erlangga. Sela, Rieneke LE. Tinangon, Alvin. 2021. *Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Kawasan Permukiman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Vol. 18 No. 2
- Novirasari, T. 2021. *Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Rencana Pemindahan Ibu Kota Jakarta Ke Kalimantan Timur (Event Study Pada Sektor Property & Real Estate yang Listing Di BEI)*.

- Nugraha, Y.K., Nugraha, A.L., dan Wijaya,A.P, 2014. *Pemetaan SIG Untuk Menentukan Lokasi Potensial Pengembangan Kawasasn Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Kabupaten Boyolali)*. Geodesi Undip (Sistem Informasi Geografis) 240-252
- Pramukanto, Hasanah. 2016. *Perencanaan Lanskap Cigudeg Sebagai Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat*. Jurnal Lanskap Indonesia Vol. 8 (2) : 91-104
- Purba, Herman. 2015. *Prinsip Perancangan Kawasan Pemerintahan di Palabuhanratu Sukabumi*. Slide share: Abstrak Bidang Khusus Rancang Kota Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Bandung 2015.
- Purnama, Denny Setia. 2015. *Penentuan Tekstur dan Konsistensi Tanah*. Universitas Negeri Malang : Geografi
- Putra Sopiandy, Anugrah (2018) *Identifikasi Pemanfaatan Dan Penyimpangan Pola Ruang Di Sub Wilayah Kota (SWK) Karees Zona B2*. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Ridha, Rasyid. Vipriyanti, Nyoman Utari. Wiswasta, IGN Alit. 2016. *Analisis Daya Dukung Lahan Sebagai Pengembangan Fasilitas Perkotaan Kecamatan Mpunda Kota Bima Tahun 2015-2035*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol. 4 (1) hal : 65-80
- Rohmadin, Sulthon. Kusmana, Dedi. Batubara, Yusi Eva. 2017. *Analisis Penataan Daerah di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol.9 No. 1.
- Sahamony, Anugerah A. Dkk. 2020. *Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibukota Negara Indonesia*. Jurnal Teknosains Vol. 10 Hal. 86-101.
- Saparini, Hendri. 2017. *Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)*
- Supar, S. 2016 *Bab II Tinjauan Umum Tentang Air*.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/231/2/BAB%20II.pdf>.

- Susanto, I Wayan. DKK. 2013. *Analisis Daya Dukung Lingkungan Sektor Pertanian Berbasis Produktivitas Di Kabupaten Bangli*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No. 1, Februari 2013, hlm. 115-123
- Surtiani, Eny Endang. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*. Undip : Semarang
- Syahmat, Muh Zulfiqri. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 Hal.44-61
- Tobing, Rumiati Rosaline, DKK. 2014. *Karakteristik Fisik Koridor Komersial Antar Kota Baru Dalam Kaitannya dengan Penataan Periferi Kawasan Terstruktur dan Regulasi*. Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Tupi, Rio Diharjo. 2014. *Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Keunggulan Wilayah Untuk Pengembangan Kacang Tanah (Arachis Hypogaeae L.) Di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo*. Tesis. Universitas Negeri Gorontalo.
- Tyas, R Wahyu Nig. Priyono, KD. 2019. *Analisis Spasial Alih Fungsi Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Di Kecamatan Banyudono Tahun 2008 – 2018 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*.
- Utami, Weni Dewi. 2012. *Model Permukiman Perkotaan Berkelanjutan Pada Wilayah Bergambut di Kawasan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*.
- Widyaastuty, Anak Agung Sagung Alit. DKK. 2020. *Analisis Kemampuan Lahan Permukiman di Kawasan Strategis Ekonomi*. Vol. 15 No. 2
- Wyadnyana, AAGR. 2020. *Bab II Tinjauan Pustaka*. <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/3969/3/BAB%20II.pdf>
- Yogaswara, Laila Mardlotillah. Darmawan. Iswati, Asdar. 2014. *Analisis keselarasan antara penggunaan lahan saat ini dengan alokasi ruang dan status lahan (Studi kasus Kabupaten Bogor Bagian Barat)*. Jurnal Tanah Lingkungan Vol. 16(2) Hal:75-82

REGULASI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.20 tahun 2007 Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Peraturan Menteri Negara Agraria Tata Ruang No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534 Tahun 2001
Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan
Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum

Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 271 Tahun 1996 Tentang
Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian

Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun
2009-2029.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor Tahun
2016-2036

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2014 tentang (RPJM) Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2019 tentang (RPJM) Kabupaten
Bogor Tahun 2018-2023

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bogor Tahun
2015-2019

Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022-2042

WEBSITE

Himawan, Aditya. 2016. *Ketersediaan Lahan Penting untuk Jaminan Ketersediaan
Pangan*. <[https://www.suara.com/bisnis/2016/09/02/190758/](https://www.suara.com/bisnis/2016/09/02/190758/ketersediaan-lahan-penting-untuk-jamin-ketersediaan-pangan) ketersediaan-
lahan-penting-untuk-jamin-ketersediaan-pangan> diakses 15 Februari 2022.

Isa, Iwan. 2006. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*.
<[https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1465-757-
20200730074726.pdf](https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1465-757-20200730074726.pdf)> Diakses 15 Februari 2022.

Landoala, Tasrif. 2013. *Lahan potensial dan lahan kritis*.
<[http://jembatan4.blogspot.com/2013/09/lahan-potensial-dan-lahan-
kritis.html](http://jembatan4.blogspot.com/2013/09/lahan-potensial-dan-lahan-kritis.html)> Diakses 15 Februari 2022.

- Romenah. 2010. *Lahan Potensial dan Lahan Kritis*.
<<https://andimanwno.files.wordpress.com/2010/08/lahan-potensial-dan-lahan-kritis.pdf>> Diakses 15 Februari 2022.
- Widya, A. 2021. *Bahaya Geologi*.
<https://repository.unikom.ac.id/68037/1/Pertemuan%209%20Bahaya%20Geologi.pdf>. diakses 28 februari 2022.
- Walhadi, Iyan. 2021. *Kabupaten Bogor Barat Terbentuk, Dua Kecamatan ini jadi calon Ibu Kotanya*. <https://www.google.com/amp/s/isubogor.pikiran-rakyat.com/bogorian/amp/pr-451206379/kabupaten-bogor-barat-terbentuk-dua-kecamatan-ini-jadi-calon-ibukotanya>. Diakses 24 April 2022

INSTANSI/DINAS

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bogor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bogor
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Petanahan Kabupaten Bogor
Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat